



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



2024

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Telp. 0751-7054555, 7054374

www.bappeda.sumbarprov.go.id





GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050-591-2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Sekretariat Daerah
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
6. Perubahan Rencana Kerja RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
7. Perubahan Rencana Kerja RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang;

8. Perubahan Rencana Kerja RSUD Mohammad Natsir Solok;
9. Perubahan Rencana Kerja RSUD Pariaman;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
26. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
27. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
29. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
30. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
31. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
32. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan;

33. Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
34. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
35. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
36. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
37. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
38. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
39. Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
40. Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung;
41. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
43. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua TAPD;
2. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 050-591-2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

43. PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, sehingga optimalisasi konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Padang, 31 Juli 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sampai Triwulan II Tahun 2024.....	7
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II	10
2.3 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda	19
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	22
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	23
3.1 Tujuan dan Sasaran	23
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	24
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024	32
IV. PENUTUP	42
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	42
4.2 Rencana Tindak Lanjut	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana tertulis pada Pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran

Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/105/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja indikator kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024
2. Pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2024

1.1.1. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berpedoman kepada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1.1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai dalam kurun waktu 1–5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan dengan tegas bahwa sasaran Renstra perangkat daerah dan sasaran Renja perangkat daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah khususnya dalam hal sasaran sebagai dasar dalam penilaian SAKIP perangkat daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 juga berpedoman kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.1.3. Renja dan Tindak Lanjut dalam APBD

Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Sedangkan Perubahan RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menjamin pencapaian target kinerja sasaran Bappeda melalui penyesuaian perencanaan substansi kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran.
2. Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten dan sinkron dengan rencana strategis lima tahunan .

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang perubahan Renja, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, analisis gambaran pelayanan Bappeda, dan penentuan isu penitng penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024;

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

Berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan Perubahan terhadap Renja Tahun 2024. Pada Bab ini akan diuraikan hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renja Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sampai Triwulan II Tahun 2024

Capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga Triwulan II Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaa	Indeks Kualitas Perencanaan	81	45,62	56,32%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	97	92,16	94,98%

Dari tabel diatas dapat diketahui, hingga akhir triwulan II Tahun 2024, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan persentase capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 56,32%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan target tahun 2024 sebesar 81% dan terealisasi sampai triwulan II sebesar 45,62%. Capaian ini didapat dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 3 dimensi yaitu 1) Dimensi Proses, 2) Dimensi Isi, dan 3) Dimensi Tindak Lanjut. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dimensi yang telah dilakukan pentahapannya adalah Dimensi Proses dengan realisasi sebesar 15,28%, Dimensi Isi dengan realisasi sebesar 30% dan Dimensi Tindak Lanjut dengan realisasi sebesar 0,33%. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum sesuai dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 50%, dimana terdapat beberapa faktor penghambat yaitu :
 - a. Belum semua Perangkat Daerah yang melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2025. Berdasarkan data dan informasi yang diupload Perangkat Daerah melalui Sakato Plan, dari 51 Perangkat Daerah, baru 33 Perangkat Daerah yang melaksanakan Forum OPD.
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tidak tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan pada Kalender Perencanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-892-2023 yang juga merupakan amanah Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu pada minggu ke-3 Januari 2024. Sementara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 baru dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024.
 - c. Survey kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik belum dilakukan, sehingga tidak diketahui seberapa besar manfaat pelaksanaan Konsultasi Publik bagi masyarakat.
 - d. Terdapat beberapa target indikator kinerja daerah yang tidak tercapai pada beberapa Perangkat Daerah, dimana dari 230 Indikator Kinerja Daerah baru sebanyak 11 Indikator Kinerja Daerah yang tercapai sesuai dengan targetnya.

Dalam hal ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat surat edaran perihal pentahapan Penyusunan Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta menginformasikan pentahapan tersebut pada Perangkat Daerah. Dalam hal ini, jika masih ada Perangkat Daerah yang tidak

melaksanakan Forum OPD, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut tidak akan dibahas.

- b. Berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang telah dituangkan kedalam Kalender Perencanaan disetiap tahunnya.
 - c. Menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat dan berdampak dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah.
 - d. Mengevaluasi rincian belanja pada masing-masing sub kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU dan IKD pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja perangkat daerah dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - f. Melibatkan Non State Actor (NSA) dalam pelaksanaan pengendalian rencana yang disusun termasuk dalam pencapaian indikator kinerja pembangunan dalam bentuk FGD.
2. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target tahun 2024 sebesar 81,83% terealisasi sebesar 84,09% (Predikat A) atau dengan capaian sebesar 102,76% berdasarkan Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Inspektorat pada tanggal 29 April s.d 3 Juni 2024.
 3. Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan capaian kinerja 94,98%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target tahun 2024 sebesar 97% dan terealisasi sebesar 92,16%. Indikator kinerja sasaran ini dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga April 2024 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 85,62 % dari total 146 orang responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 30 Juni 2024.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan pagu dana pada Renja Tahun 2024 sebesar Rp 27.662.092.079,- dan menjadi sebesar Rp 21.069.543.842,- pada tahap APBD Tahun 2024 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 35,56% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.107.536.371,- (14,75%) jika dibandingkan dengan pagu APBD dan sebesar 11,23% jika dibandingkan dengan pagu Renja, sebagaimana tabel 2.2.1.berikut:

Tabel 2.2.1
Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%			14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%	
	5.01	PERENCANAAN				135.564.917.000		37.835.728.573		27.662.092.079		3.107.536.371		6.135.575.119	-	-	-	-		9.243.111.490		33,41		47.078.840.063		25,99	34,73
	5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	500	73.206.290.000	100	29.909.366.108	100	15.570.611.779	25	2.877.713.771	25	5.570.902.599	-	-	-	-	50	8.448.616.370	50,00	54,26	150	38.357.982.478	30,00	52,40	
	5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	500	1.084.000.745	100	277.715.464	100	103.406.600	25	25.511.000	25	- 1.647.750	-	-	-	-	50	23.863.250	50,00	23,08	150	301.578.714,00	30,00	27,82	
1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	663.275.160	2	174.075.400	6	47.539.100	1	18.179.000	1	1.271.250	-	-	-	-	2	19.450.250	33,33	40,91	4	193.525.650,00	40,00	29,18	Subbag Program
2	5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.165.000	1	7.758.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	7.758.400,00	100,00	76,32	Subbag Program	
3	5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000	1	7.272.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	7.272.500,00	100,00	96,97	Subbag Program	
4	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	17	85.835.500	1	4.446.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	4.446.600,00	5,88	5,18	Subbag Program	
5	5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000	1	5.046.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	5.046.400,00	100,00	67,29	Subbag Program	
6	5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	112.700.598	4	61.383.764	4	13.446.000	2	6.126.000	2	1.462.000	-	-	-	-	4	7.588.000	100,00	56,43	8	68.971.764,00	40,00	61,20	Subbag Program
7	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	197.024.488	4	17.732.400	5	42.421.500	-	1.206.000	1	- 4.381.000	-	-	-	-	1	- 3.175.000	20,00	- 7,48	5	14.557.400,00	25,00	7,39	Subbag Program
	5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	500	46.575.242.829	100	19.749.128.889	100	11.404.297.637	25	2.101.212.250	25	4.083.190.916	-	-	-	-	50	6.184.403.166	50,00	54,23	150	25.933.532.055,00	30,00	55,68	
1	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	500	43.512.417.829	80	19.231.106.415	100	11.158.348.237	79	2.026.601.850	-	4.028.413.916	-	-	-	-	79	6.055.015.766	79,00	54,26	159	25.286.122.181,00	31,80	58,11	Subbag Keuangan
2	5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	2.449.250.000	24	432.684.250	12	200.664.300	-	61.614.000	6	53.520.000	-	-	-	-	6	115.134.000	50,00	57,38	30	547.818.250,00	50,00	22,37	Subbag Keuangan
3	5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	545	126.250.000	109	4.833.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	109	4.833.500,00	20,00	3,83	Subbag Keuangan	
4	5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	75.750.000	1	8.423.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	8.423.300,00	20,00	11,12	Subbag Keuangan	
5	5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	15	58.075.000	1	2.460.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	2.460.724,00	6,67	4,24	Subbag Keuangan	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16					
7	5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	55.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg	
8	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	3.543.982.578	4	2.579.306.457	4	817.420.000	-	299.127.991	2	816.003.565	-	-	-	2	1.115.131.556	50,00	136,42	6	3.694.438.013,00	30,00	104,25	Subbag Umpeg	
9	5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	20	1.339.650.000	4	520.000.000	1	260.000.000	-	30.000.000	1	85.000.000	-	-	-	1	115.000.000	100,00	44,23	5	635.000.000,00	25,00	47,40	Subbag Umpeg	
	5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	500	2.037.446.229	100	1.223.351.625	100	319.315.970	25	-	-	-	-	-	25	-	25,00	-	125	1.223.351.625,00	25,00	60,04			
1	5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	338.276.018	1	33.164.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	33.164.625,00	25,00	9,80	Subbag Umpeg		
2	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24	547.270.211	4	151.687.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	151.687.000,00	16,67	27,72	Subbag Umpeg		
3	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	1.115.000.000	3	1.038.500.000	6	319.315.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.038.500.000,00	13,64	93,14	Subbag Umpeg		
4	5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	36.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
	5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	8.187.359.797	100	2.719.393.983	100	1.310.458.132	25	262.693.310	-	441.609.357	-	-	25	704.302.667	25,00	53,74	125	3.423.696.650,00	25,00	41,82			
1	5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	37.875.000	24	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	24	7.500.000,00	40,00	19,80	Subbag Umpeg		
2	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.997.369.000	24	539.386.654	12	313.506.000	-	78.180.016	6	82.917.924	-	-	-	-	161.097.940	-	51,39	24	700.484.594,00	40,00	35,07	Subbag Umpeg	
3	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.152.115.797	24	2.172.507.329	12	996.952.132	-	184.513.294	6	358.691.433	-	-	-	6	543.204.727	50,00	54,49	30	2.715.712.056,00	50,00	44,14	Subbag Umpeg	
	5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	500	2.653.416.509	100	1.158.657.672	100	612.790.000	25	77.701.180	-	109.801.161	-	-	-	25	187.502.341	25,00	30,60	125	1.346.160.013,00	25,00	50,73		
1	5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	221.454.500	2	79.408.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	79.408.451,00	40,00	35,86	Subbag Umpeg		
2	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	941.825.000	20	499.402.521	12	357.400.000	-	77.701.180	7	86.005.161	-	-	-	7	163.706.341	58,33	45,80	27	663.108.862,00	54,00	70,41	Subbag Umpeg	
3	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	349	335.011.000	87	83.713.910	72	59.690.000	-	-	14	6.735.000	-	-	-	14	6.735.000	19,44	11,28	101	90.448.910,00	28,94	27,00	Subbag Umpeg	
4	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.013.626.009	2	367.929.560	1	141.000.000	-	-	1	7.092.500	-	-	-	1	7.092.500	100,00	5,03	3	375.022.060,00	60,00	37,00	Subbag Umpeg	
5	5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	240	141.500.000	117	128.203.230	48	54.700.000	-	-	8	9.968.500	-	-	-	8	9.968.500	16,67	18,22	125	138.171.730,00	52,08	97,65	Subbag Umpeg	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%	16					
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	449	23.886.777.000	78,84	2.825.511.168	87	4.680.752.700	4,78	117.814.000	-	325.522.600	-	-	-	4,78	443.336.600	5,49	9,47	84	3.268.847.768	18,62	13,68		
	5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	dokumen	15	13.746.177.000	2	1.914.634.277	3	2.865.017.700	-	72.654.000	-	304.384.200	-	-	-	-	377.038.200	-	13,16	2	2.291.672.477.00	13,33	16,67		
1	5.01.02.1.01.02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	679.943.327	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	Bidang P2EPD	
2	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	7	1.535.000.000	2	184.078.891	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2	184.078.891,00	28,57	11,99	Bidang P2EPD			
3	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	915.000.000	2	78.287.850	1	64.866.700	1	45.117.000	-	3.366.500	-	-	-	-	1	48.483.500	100,00	74,74	3	126.771.350,00	60,00	13,85	Bidang P2EPD
4	5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	416.233.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Bidang P2EPD	
5	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	5	3.050.000.000	2	432.815.550	1	1.429.386.100	-	-	1	255.781.100	-	-	-	-	1	255.781.100	100,00	17,89	3	688.596.650,00	60,00	22,58	Bidang P2EPD
6	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	7.150.000.000	4	1.219.451.986	2	1.370.764.900	-	27.537.000	-	45.236.600	-	-	-	-	-	72.773.600	-	5,31	4	1.292.225.586,00	40,00	18,07	Bidang P2EPD
	5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	20	4.088.750.000	3	447.412.218	4	806.130.000	-	3.360.000	-	6.376.400	-	-	-	-	-	9.736.400	-	1,21	3	457.148.618,00	15,00	11,18	
1	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	1.008.750.000	2	214.854.708	1	439.881.000	-	3.360.000	1	5.502.000	-	-	-	-	1	8.862.000	100,00	2,01	3	223.716.708,00	60,00	22,18	Bidang P2EPD
2	5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	5	915.000.000	1	105.171.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	105.171.000,00	20,00	11,49	Bidang P2EPD	
3	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	5	872.500.000	2	127.386.510	38	366.249.000	-	-	38	874.400	-	-	-	-	38	874.400	100,00	0,24	40	128.260.910,00	800,00	14,70	Bidang P2EPD
4	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	1.292.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Bidang P2EPD	
	5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	%	449	6.051.850.000	60,87	463.464.673	87	1.009.605.000	4,78	41.800.000	-	14.762.000	-	-	-	-	4,78	56.562.000	5,49	5,60	66	520.026.673,00	14,62	8,59	
1	5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	872.500.000	4	150.926.073	2	448.781.500	-	-	2	12.381.500	-	-	-	-	2	12.381.500	100,00	2,76	6	163.307.573,00	60,00	18,72	Bidang P2EPD
2	5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	5	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang P2EPD	
3	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	15	919.350.000	3	135.809.150	3	327.592.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	135.809.150,00	20,00	14,77	Bidang P2EPD	
4	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	190	3.760.000.000	81	176.729.450	38	233.231.500	-	41.800.000	19	2.380.500	-	-	-	-	19	44.180.500	50,00	18,94	100	220.909.950,00	52,63	5,88	Bidang P2EPD

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
												I	II		III	IV										
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	340	38.471.850.000	100	5.100.851.297	60	7.410.727.600	-	112.008.600	-	239.149.920	-	-	-	351.158.520	-	4,74	100	5.452.009.817	29,41	14,17		
	5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	12	13.344.693.415	2	1.847.836.153	2	2.636.295.795	-	6.246.000	2	128.580.020	-	-	-	2	134.826.020	100,00	5,11	4	1.982.662.173,00	33,33	14,86	
1	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	1.607.107.280	4	338.387.735	3	396.067.700	-	6.246.000	2	13.164.700	-	-	-	2	19.410.700	66,67	4,90	6	357.798.435,00	54,55	22,26	Bidang PPM
2	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	15	1.112.166.875	4	100.248.750	3	74.082.900	-	-	2	20.631.800	-	-	-	2	20.631.800	66,67	27,85	6	120.880.550,00	40,00	10,87	Bidang PPM
3	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	522.172.195	2	112.611.050	1	103.253.000	-	-	-	13.630.300	-	-	-	-	13.630.300	-	13,20	2	126.241.350,00	40,00	24,18	Bidang PPM
4	5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	667.300.125	2	50.351.730	1	131.950.600	-	-	-	7.994.100	-	-	-	-	7.994.100	-	6,06	2	58.345.830,00	40,00	8,74	Bidang PPM
5	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	2.770.474.325	4	352.649.791	3	677.264.080	-	-	2	4.938.700	-	-	-	2	4.938.700	66,67	0,73	6	357.588.491,00	54,55	12,91	Bidang PPM
6	5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	15	3.099.608.875	4	147.011.650	3	103.197.700	-	-	2	15.419.800	-	-	-	2	15.419.800	66,67	14,94	6	162.431.450,00	40,00	5,24	Bidang PPM
7	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	1.257.316.820	2	128.564.900	1	395.760.450	-	-	-	12.290.620	-	-	-	-	12.290.620	-	3,11	2	140.855.520,00	40,00	11,20	Bidang PPM
8	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	2.308.546.920	2	618.010.547	1	754.719.365	-	-	-	40.510.000	-	-	-	-	40.510.000	-	5,37	2	658.520.547,00	40,00	28,53	Bidang PPM
	5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	12	10.245.103.893	2	1.530.741.104	2	1.836.010.015	-	76.537.500	2	51.913.800	-	-	-	2	128.451.300	100,00	7,00	4	1.659.192.404,00	33,33	16,19	
1	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	2.446.767.025	4	166.385.877	3	250.000.000	-	14.042.300	2	7.898.000	-	-	-	2	21.940.300	66,67	8,78	6	188.326.177,00	54,55	7,70	Bidang Eko-SDA
2	5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Laporan	15	1.312.356.790	4	110.905.500	3	35.240.000	-	9.156.700	2	12.515.000	-	-	-	2	21.671.700	66,67	61,50	6	132.577.200,00	40,00	10,10	Bidang Eko-SDA
3	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Laporan	5	702.712.425	2	136.230.900	1	363.215.515	-	12.830.700	-	2.860.000	-	-	-	-	15.690.700	-	4,32	2	151.921.600,00	40,00	21,62	Bidang Eko-SDA

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%											16	
4	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	667.300.125	2	470.698.753	1	365.769.000	-	8.108.100	-	4.087.000	-	-	-	-	12.195.100	-	3,33	2	482.893.853,00	40,00	72,37	Bidang Eko-SDA	
5	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	2.224.333.710	4	158.808.142	3	250.000.000	-	6.386.000	2	-	-	-	-	2	6.386.000	66,67	2,55	6	165.194.142,00	54,55	7,43	Bidang Eko-SDA	
6	5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	15	1.334.600.220	4	91.629.100	3	48.347.200	-	7.255.000	2	17.933.000	-	-	-	2	25.188.000	66,67	52,10	6	116.817.100,00	40,00	8,75	Bidang Eko-SDA	
7	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	889.733.485	2	163.331.900	1	342.745.300	-	10.613.100	-	6.620.800	-	-	-	-	17.233.900	-	5,03	2	180.565.800,00	40,00	20,29	Bidang Eko-SDA	
8	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	667.300.113	2	232.750.932	1	180.693.000	-	8.145.600	-	-	-	-	-	-	8.145.600	-	4,51	2	240.896.532,00	40,00	36,10	Bidang Eko-SDA	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	12	14.882.052.692	2	1.722.274.040	2	2.938.421.790	-	29.225.100	2	58.656.100	-	-	-	2	87.881.200	100,00	2,99	4	1.810.155.240,00	33,33	12,16		
1	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	3.558.933.940	4	396.336.129	3	703.736.000	-	16.836.200	2	13.550.000	-	-	-	2	30.386.200	66,67	4,32	6	426.722.329,00	54,55	11,99	Bidang Infrasil	
2	5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	15	1.779.466.960	4	89.063.700	3	101.400.000	-	4.017.300	2	10.423.000	-	-	-	2	14.440.300	66,67	14,24	6	103.504.000,00	40,00	5,82	Bidang Infrasil	
3	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	1.557.033.525	2	89.492.050	1	307.884.500	-	2.278.100	-	5.726.500	-	-	-	-	8.004.600	-	2,60	2	97.496.650,00	40,00	6,26	Bidang Infrasil	
4	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	406.358.290	2	724.995.247	1	330.438.000	-	-	-	4.491.000	-	-	-	-	4.491.000	-	1,36	2	729.486.247,00	40,00	179,52	Bidang Infrasil	
5	5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	3.558.933.930	4	203.584.505	3	703.736.000	-	1.192.000	2	3.052.800	-	-	-	2	4.244.800	66,67	0,60	6	207.829.305,00	54,55	5,84	Bidang Infrasil	
6	5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	15	1.364.695.100	3	21.432.900	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3	21.432.900,00	20,00	1,57	Bidang Infrasil		
7	5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	5	1.112.166.855	2	50.386.600	1	319.917.500	-	2.771.500	-	1.020.200	-	-	-	-	3.791.700	-	1,19	2	54.178.300,00	40,00	4,87	Bidang Infrasil	
8	5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	5	1.544.464.092	2	146.982.909	1	471.309.790	-	2.130.000	-	20.392.600	-	-	-	-	22.522.600	-	4,78	2	169.505.509,00	40,00	10,98	Bidang Infrasil	

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal sebagaimana terlihat di dalam Tabel 2.2.1 Evaluasi Hasil terhadap Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 diatas, faktor penghambat dan tindak lanjut dalam pelaksanaan hasil Renja sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan II :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan sampai Juni 2024 terealisasi sebesar 50%. Substansi pada program ini mengakomodir belanja rutin yang menunjang operasional kantor.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan target tahun 2024 sebesar 90% dan sampai Juni 2024 terealisasi sebesar 4,78% .

Sesuai dengan definisi operasional dan formula penghitungan atas indikator program yaitu melihat ketercapaian IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi yang tercapai sesuai target dan waktu dengan formula $(\text{Total Capaian IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi yang Tercapai sesuai target dan waktu} / \text{total IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi}) \times 100 \%$, maka setelah dilakukan verifikasi dan validasi data dengan Perangkat Daerah pada tanggal 7 s.d 8 Mei 2024, dari 230 IKD sudah tercapai sebanyak 11 IKD dan 262 indikator kinerja program telah tercapai sebanyak 11 indikator. Sementara itu, untuk penghitungan IKU dan Indikator Kinerja Makro baru bisa dilakukan pada akhir triwulan IV tahun 2024.

Substansi pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Ranwal RPJP 2025-2045, RKPD 2025, P-RKPD 2024, Konsultasi Publik, forum SKPD, Musrenbang).
- Analisis data dan informasi pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah (bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan).
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah (Renja PD, fasilitasi RKPD dan P-RKPD Kab/Kota).

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD sebagaimana definisi operasional dan formula penghitungan atas indikator program yaitu melihat jumlah sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dibandingkan total jumlah sub kegiatan pada RKPD, dengan target tahun 2024 sebesar 70%. Indikator program ini baru bisa diukur pada triwulan III setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan.

Substansi pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang pemerintahan dan pembangunan, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan).
- Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang perekonomian dan sumber daya alam, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan serta Koordinasi Program Unggulan).
- Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang infrastruktur dan kewilayahan, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan).

2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada Renja sampai dengan triwulan II secara rata-rata adalah 26,01% terhadap target kinerja capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menghambat masih rendahnya realisasi, diantaranya :

- a. Tertundanya pelaksanaan verifikasi Renja pada 3 bidang yang disebabkan padatnya agenda pembahasan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

- b. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah dibuat.
3. Dari sisi anggaran, terhadap beberapa sub kegiatan yang mengalami kekurangan anggaran, seperti sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (pada 3 bidang) dan sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dalam hal ini, akan diajukan penambahan anggaran pada tahapan perubahan anggaran dengan menggeser beberapa belanja diinternal Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan teridentifikasi adanya ketidaksesuaian antara regulasi serta percepatan pelaksanaan target kinerja dan keuangan dalam tahun berjalan, maka dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian melalui Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 yang berpedoman pada Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Kebijakan/tindakan serta tindak lanjut perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Konsisten melaksanakan SOP tentang pengadministrasian kegiatan dan aliran kas pada masing-masing pelaksanaan kegiatan ke Bagian Keuangan
3. Memprioritaskan Kegiatan Internal dalam Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2.3. Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bappeda mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan yang mejadi kewenangan daerah

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah dituangkan kedalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 yang terdiri atas 3 (tiga) indikator sasaran yaitu 1) indeks kualitas perencanaan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi. Berikut pada tabel 2.3.1 dapat dilihat gambaran analisis kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.3.1
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n- 2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 s.d Trw II (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2026 (Thn n+2)	
	Renstra 2021-2026 :												
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	73	77	81	85	76,30	79,97	45,62	85	89	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	78,25	79,25	80,25	81,25	76,69	81,73	84,09	81,25	82,25	
3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	-	-	83,00	86,00	87,00	89	93,66	96,93	92,16	89,00	91,00	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai kondisi Triwulan II Tahun 2024 pada indikator kinerja pertama yaitu “Indeks Kualitas Perencanaan” dengan 3 (tiga) dimensi penilaian yaitu : Proses (30%), Isi (40%) dan Tindak Lanjut (30%) sudah tercapai 45,62% dengan rincian bahwa untuk Dimensi Proses telah tercapai 15,28%, Dimensi Isi terpenuhi 30 % sedangkan untuk Dimensi Tindak Lanjut terpenuhi 0,33%. Untuk Dimensi Isi dan Tindak Lanjut akan berproses sampai akhir Tahun 2024. Capaian indikator kinerja kedua yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang diukur melalui hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang dilakukan pada tanggal 29 April s.d 3 Juni 2024 terhadap SAKIP Bappeda Tahun 2023 sudah tercapai sebesar 84,09 (Predikat A) dan indikator kinerja ketiga yaitu “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi” dengan realisasi 92,16%.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan kegiatan mandatori yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dimana Bappeda adalah sebagai leading sektornya.

Pada Tahun 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menyusun 4 dokumen perencanaan, yaitu RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2024, hasil evaluasi kinerja tahun 2023, dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan melakukan tahapan perencanaan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam rangka mengupayakan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-3 pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dan realisasi kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024, dimana realisasi 2 indikator kinerja sasaran telah melebihi target yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk periode Tahun 2023. Berikut tabel target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Tahun 2024 :

Tabel 3.1.1

Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Target pada Renja 2024	Target pada Perubahan Renja 2024
1.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,38	26,13	26,38	26,38
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	78,97	81	81
2.	Tujuan : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,25	81,73	80,25	81,83
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87	96,93	87	97
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,25	81,73	80,25	81,83
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87	96.96	87	97

3.2 Review Terhadap Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas

hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan Rancangan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan Rancangan RKPD tahun 2024 tercantum sebagaimana pada tabel 3.2.1 berikut.

Tabel 3.2.1
T-C.31 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan									
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1				2	3	4	5		6		7	8	9		10		11		12	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01			PERENCANAAN				21.069.543.842	21.069.543.842	0	PERENCANAAN					21.069.543.842	20.840.666.343	-228.877.499		
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.608.011.852	17.608.011.852	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.608.011.852	17.706.792.553	98.780.701		
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	93.731.600	93.731.600	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	93.731.600	58.274.500	(35.457.100)		
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	37.864.100	37.864.100	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	37.864.100	31.172.100	(6.692.000)
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	13.446.000	13.446.000	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	13.446.000	8.721.000	(4.725.000)
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	42.421.500	42.421.500	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	42.421.500	18.381.400	(24.040.100)
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.923.310.035	11.923.310.035	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.923.310.035	11.906.269.036	-17.040.999		
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	11.640.495.535	11.640.495.535	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	11.640.495.535	11.640.495.536	1
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	238.575.000	238.575.000	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	238.575.000	222.924.000	(15.651.000)
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	44.239.500	44.239.500	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	44.239.500	42.849.500	(1.390.000)
5	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	127.905.500	127.905.500	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	127.905.500	127.905.500	-		
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000	110.000.000	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000	110.000.000	-

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan										
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting	
1				2		3	4		5		6		7		8	9		10		11		12
5	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.300.000	11.300.000	-	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.300.000	11.300.000	-	
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.605.500	6.605.500	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.605.500	6.605.500	-	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	132.000.000	132.000.000	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	132.000.000	260.910.000	128.910.000	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	168 Paket	168 Paket	132.000.000	132.000.000	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	168 Paket	168 Paket	132.000.000	123.750.000	(8.250.000)	
5	01	01	1.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	74 orang	-	137.160.000	137.160.000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.968.369.593	2.968.369.593	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.968.369.593	2.968.369.593	-	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	33.892.500	33.892.500	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	33.892.500	33.892.500	-	
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	78.118.040	78.118.040	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	78.118.040	78.118.040	-	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	113.315.600	113.315.600	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	113.315.600	113.315.600	-	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	29.140.000	29.140.000	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	29.140.000	29.140.000	-	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.453.903.453	2.453.903.453	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.453.903.453	2.453.903.453	-	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	260.000.000	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	260.000.000	-	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	40.000.000	40.000.000	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	40.000.000	62.368.800	22.368.800	
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	40.000.000	40.000.000	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	40.000.000	62.368.800	22.368.800	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.727.685.124	1.727.685.124	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.727.685.124	1.727.685.124	-	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	354.906.000	354.906.000	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	354.906.000	354.906.000	-	

Kodeifikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting	
1	2				3	4	5	6				7	8	9		10	11			12	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.372.779.124	1.372.779.124	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.372.779.124	1.372.779.124	-	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	595.010.000	595.010.000	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	595.010.000	595.010.000	-	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	357.400.000	357.400.000	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	357.400.000	357.400.000	-	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	72 unit	59.690.000	59.690.000	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	72 unit	59.690.000	59.690.000	-	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	125.620.000	125.620.000	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	125.620.000	125.620.000	-	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	48 unit	52.300.000	52.300.000	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	48 unit	52.300.000	52.300.000	-	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 persen	90 persen	1.277.451.200	1.277.451.200	0	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 persen	90 persen	1.277.451.200	1.277.451.200	0	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	859.118.300	859.118.300	-	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	859.118.300	908.743.300	49.625.000	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	60.436.500	60.436.500	-	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	60.436.500	50.596.500	(9.840.000)	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara	394.186.100	394.186.100	-	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara	394.186.100	255.901.100	(138.285.000)	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	404.495.700	404.495.700	-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	404.495.700	602.245.700	197.750.000	

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1				2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12		
5	01	02	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	105.032.900	105.032.900	-	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	105.032.900	105.032.900	-	
5	01	02	1.02	01	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	57.408.500	57.408.500	-	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	57.408.500	57.408.500	-	
5	01	02	1.02	03	Sumatera Barat	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38 Orang	38 Orang	47.624.400	47.624.400	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	38 Orang	47.624.400	47.624.400	-	
5	01	02	1.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90 persen	90 persen	313.300.000	313.300.000	-	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 persen	90 persen	313.300.000	263.675.000	(49.625.000)	
5	01	02	1.03	01	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	81.376.500	81.376.500	-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	81.376.500	81.376.500	-	
5	01	02	1.03	03	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	71.492.000	71.492.000	-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	71.492.000	-	(71.492.000)	
5	01	02	1.03	04	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 Dokumen	160.431.500	160.431.500	-	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 Dokumen	160.431.500	182.298.500	21.867.000	
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	70 persen	70 persen	2.184.080.790	2.184.080.790	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 persen	70 persen	2.184.080.790	1.856.422.590	-327.658.200	
5	01	03	1.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	869.916.050	869.916.050	-	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	869.916.050	816.686.050	-53.230.000	
5	01	03	1.01	01	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	165.259.700	165.259.700	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	165.259.700	103.807.700	(61.452.000)	
5	01	03	1.01	02	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	41.286.800	41.286.800	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	41.286.800	66.601.800	25.315.000	
5	01	03	1.01	03	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	71.479.750	71.479.750	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	71.479.750	65.094.750	(6.385.000)	
5	01	03	1.01	04	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	43.318.100	43.318.100	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	43.318.100	35.413.100	(7.905.000)	

Kode	Fas	Kode	Fas	Kode	Fas	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan										
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	215.073.100	215.073.100	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	215.073.100	182.600.100	(32.473.000)	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	56.827.700	56.827.700	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	56.827.700	56.827.700	-	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	82.884.400	82.884.400	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	82.884.400	92.634.400	9.750.000	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	193.786.500	193.786.500	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	193.786.500	213.706.500	19.920.000	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen	773.895.940	773.895.940	-	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen	773.895.940	573.924.940	(199.971.000)	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	80.916.000	80.916.000	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	80.916.000	68.138.000	(12.778.000)	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	31.926.700	31.926.700	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	31.926.700	35.586.700	3.660.000	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	116.670.700	116.670.700	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	116.670.700	139.390.700	22.720.000	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	264.934.300	264.934.300	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	264.934.300	38.334.300	(226.600.000)	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	79.950.000	79.950.000	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	79.950.000	43.367.000	(36.583.000)	
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	40.468.000	40.468.000	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	40.468.000	40.468.000	-	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	109.502.640	109.502.640	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	109.502.640	149.502.640	40.000.000	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	49.527.600	49.527.600	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	49.527.600	59.137.600	9.610.000	

Kodefikasi				Rancangan Awal Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan									
				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1				2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12		
5	01	03	1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	540.268.800	540.268.800	-	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	540.268.800	465.811.600	(74.457.200)	
5	01	03	1.03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	137.209.200	137.209.200	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	137.209.200	99.909.000	(37.300.200)	
5	01	03	1.03	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	47.627.300	47.627.300	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	47.627.300	37.627.300	(10.000.000)	
5	01	03	1.03	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	-	
5	01	03	1.03	04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	21.537.300	21.537.300	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	21.537.300	26.537.300	5.000.000	
5	01	03	1.03	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	65.185.900	65.185.900	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	65.185.900	33.028.900	(32.157.000)	
5	01	03	1.03	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	-	
5	01	03	1.03	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	143.709.100	143.709.100	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	143.709.100	143.709.100	-	

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Rancangan Perubahan RKPD 2024 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp 21.069.543.842- sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01				PERENCANAAN			27.662.092.079	21.069.543.842	21.069.543.842	-6.592.548.237			27.609.004.648		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	15.570.611.779	17.608.011.852	17.608.011.852	2.037.400.073		100 persen	14.832.936.248	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	103.406.600	93.731.600	93.731.600	(9.675.000)		100%	214.311.200	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	47.539.100	37.864.100	37.864.100	(9.675.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 dokumen	152.979.500	Sekretariat
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	13.446.000	13.446.000	13.446.000	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	22.316.950	Sekretariat
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4 laporan	42.421.500	42.421.500	42.421.500	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 laporan	39.014.750	Sekretariat
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.404.297.637	11.923.310.035	11.923.310.035	519.012.398		100%	9.319.150.890	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	74 orang/bulan	11.158.348.237	11.640.495.535	11.640.495.535	482.147.298	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 orang/bulan	8.739.150.890	Sekretariat
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	200.664.300	238.575.000	238.575.000	37.910.700	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 dokumen	510.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	45.285.100	44.239.500	44.239.500	(1.045.600)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 laporan	70.000.000	Sekretariat

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	135.315.500	127.905.500	127.905.500	- 7.410.000		100%	293.142.110	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	128.142.110	Sekretariat
5	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	18.710.000	11.300.000	11.300.000	(7.410.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Laporan	125.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.605.500	6.605.500	6.605.500	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Laporan	40.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	387.585.000	132.000.000	132.000.000	- 255.585.000		100%	553.000.000	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	168 Paket	168 Paket	66.750.000	132.000.000	132.000.000	65.250.000	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	168 Paket	138.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang	0	320.835.000	-	-	(320.835.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	85 orang	415.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.297.442.940	2.968.369.593	2.968.369.593	1.670.926.653		100%	1.803.485.816	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	19.998.500	33.892.500	33.892.500	13.894.000	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24 Paket	20.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Paket	316.040.762	Sekretariat
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	54.518.840	78.118.040	78.118.040	23.599.200	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17 Paket	55.137.000	Sekretariat

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	116.365.600	113.315.600	113.315.600	(3.050.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 Paket	401.311.504	Sekretariat
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	29.140.000	29.140.000	29.140.000	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 Paket	25.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 dokumen	10.500.000	Sekretariat
5	01	01	1.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 laporan	15.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	817.420.000	2.453.903.453	2.453.903.453	1.636.483.453	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Laporan	687.496.550	Sekretariat
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	260.000.000	260.000.000	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Dokumen	273.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	319.315.970	40.000.000	40.000.000	(279.315.970)		100%	455.000.000	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Paket	150.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	319.315.970	40.000.000	40.000.000	(279.315.970)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 unit	300.000.000	Sekretariat
5	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	5.000.000	Sekretariat

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.310.458.132	1.727.685.124	1.727.685.124	417.226.992		100%	1.654.922.732	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 Laporan	7.500.000	Sekretariat
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	313.506.000	354.906.000	354.906.000	41.400.000	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 Laporan	409.380.000	Sekretariat
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	996.952.132	1.372.779.124	1.372.779.124	375.826.992	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 Laporan	1.238.042.732	Sekretariat
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	612.790.000	595.010.000	595.010.000	(17.780.000)		100%	539.923.500	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	357.400.000	357.400.000	357.400.000	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 unit	232.390.000	Sekretariat
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	72 unit	59.690.000	59.690.000	59.690.000	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	72 unit	78.220.000	Sekretariat
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	141.000.000	125.620.000	125.620.000	(15.380.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	199.313.500	Sekretariat
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	48 Unit	54.700.000	52.300.000	52.300.000	(2.400.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	30 Unit	30.000.000	Sekretariat

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 persen	90 persen	4.680.752.700	1.277.451.200	1.277.451.200	-3.403.301.500		90 persen	4.904.115.000	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	2.865.017.700	859.118.300	859.118.300	- 2.005.899.400		3 dokumen	2.826.255.000	
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Dokumen	138.255.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Dokumen	315.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	64.866.700	60.436.500	60.436.500	(4.430.200)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Berita Acara	189.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	51 Berita Acara	84.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.429.386.100	394.186.100	394.186.100	(1.035.200.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Berita Acara	630.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	1.370.764.900	404.495.700	404.495.700	(966.269.200)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	1.470.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	806.130.000	105.032.900	105.032.900	(701.097.100)		4 dokumen	834.750.000	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	439.881.000	57.408.500	57.408.500	(382.472.500)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Dokumen	204.750.000	Bidang P2EPD

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	102 Orang	189.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	38 Orang	366.249.000	47.624.400	47.624.400	(318.624.600)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 Orang	178.500.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Buku	262.500.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 persen	90 persen	1.009.605.000	313.300.000	313.300.000	(696.305.000)		90 persen	1.243.110.000	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	448.781.500	81.376.500	81.376.500	(367.405.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Laporan	300.000.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	327.592.000	71.492.000	71.492.000	(256.100.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	187.110.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 Dokumen	233.231.500	160.431.500	160.431.500	(72.800.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 Dokumen	756.000.000	Bidang P2EPD
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 persen	70 persen	7.410.727.600	2.184.080.790	2.184.080.790	-5.226.646.810		70 persen	7.871.953.400	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	2.636.295.795	869.916.050	869.916.050	- 1.766.379.745		3 dokumen	2.730.944.250	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	396.067.700	165.259.700	165.259.700	(230.808.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Dokumen	328.888.800	Bidang PPM

Kode					Uraun/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	74.082.900	41.286.800	41.286.800	(32.796.100)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	227.601.000	Bidang PPM
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	103.253.000	71.479.750	71.479.750	(31.773.250)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	106.860.750	Bidang PPM
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	131.950.600	43.318.100	43.318.100	(88.632.500)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	136.560.600	Bidang PPM
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	677.264.080	215.073.100	215.073.100	(462.190.980)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Dokumen	566.967.745	Bidang PPM
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	103.197.700	56.827.700	56.827.700	(46.370.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	634.323.980	Bidang PPM
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	395.760.450	82.884.400	82.884.400	(312.876.050)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	257.305.435	Bidang PPM
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	754.719.365	193.786.500	193.786.500	(560.932.865)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	472.435.940	Bidang PPM

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen	1.836.010.015	773.895.940	773.895.940	(1.062.114.075)		3 dokumen	2.096.623.595	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000	80.916.000	80.916.000	(169.084.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Dokumen	500.722.200	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	35.240.000	31.926.700	31.926.700	(3.313.300)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	268.569.180	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	363.215.515	116.670.700	116.670.700	(246.544.815)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	143.807.615	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	365.769.000	264.934.300	264.934.300	(100.834.700)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	136.560.600	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000	79.950.000	79.950.000	(170.050.000)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Dokumen	455.202.000	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	48.347.200	40.468.000	40.468.000	(7.879.200)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	273.121.200	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	342.745.300	109.502.640	109.502.640	(233.242.660)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	182.080.800	Bidang Ekonomi dan SDA
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	180.693.000	49.527.600	49.527.600	(131.165.400)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	136.560.000	Bidang Ekonomi dan SDA

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah / Berkurang	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
5	01	03	1.03		5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	2.938.421.790	540.268.800	540.268.800	(2.398.152.990)		3 dokumen	3.044.385.555	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	703.736.000	137.209.200	137.209.200	(566.526.800)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Dokumen	728.323.200	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	101.400.000	47.627.300	47.627.300	(53.772.700)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	364.161.600	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	307.884.500	65.000.000	65.000.000	(242.884.500)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	318.641.400	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	330.438.000	21.537.300	21.537.300	(308.900.700)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	82.764.000	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	703.736.000	65.185.900	65.185.900	(638.550.100)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Dokumen	728.323.200	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	0	-	-	-	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 Laporan	279.280.000	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	319.917.500	60.000.000	60.000.000	(259.917.500)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	227.601.000	Bidang Infraswil
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	471.309.790	143.709.100	143.709.100	(327.600.690)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	315.291.155	Bidang Infraswil

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan Tahun 2024, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya serta menjaga konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan.
2. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI